

BAB III

TEMUAN PRAKTIK OLIGARKI DAN POLITIK DINASTI DALAM PILKADA SOLO 2020

Bab ini mendalami praktik oligarki dan politik dinasti di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan menjadikan fenomena Pencalonan Kepala Daerah di Kota Surakarta Tahun 2020 sebagai studi kasus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis mengenai adanya praktik oligarki dan politik dinasti di dalam proses kandidasi Kepala Daerah Kota Surakarta. Data yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara kepada informan yang berkaitan erat dengan subjek dari penelitian ini yaitu PDI Perjuangan dan juga bersumber dari data sekunder berupa dokumentasi. Adapun untuk menciptakan hasil yang terstruktur dan sistematis mungkin, peneliti akan melakukan kajian komprehensif terhadap aspek-aspek meliputi: mekanisme rekrutmen calon kepala daerah oleh PDI Perjuangan, pengaruh oligarki dalam kandidasi kepala daerah Kota Surakarta tahun 2020 dan politik dinasti dalam pencalonan Wali Kota Surakarta tahun 2020.

3.1 Mekanisme Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh PDI Perjuangan

Secara konstitusional Anggaran Dasar PDI Perjuangan, termuat dalam Pasal 87 tentang Kaderisasi Partai, dalam ayat (1) disebutkan bahwa Kaderisasi Partai dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu di bawah pengawasan DPP Partai. Adapun dalam ayat (2) disebutkan kaderisasi partai berdasarkan jenjangnya terdiri dari: kaderisasi tingkat pratama; kaderisasi tingkat madya, dan kaderisasi tingkat utama. Adapun dalam Pasal 88 dijelaskan dalam rangka kepentingan partai, maka selain kaderisasi Partai sebagaimana dimaksud dalam

pasal 87 ayat (2), PDI Perjuangan di bawah DPP memiliki sekolah partai dan sekolah kader partai, dimana sekolah partai bertujuan untuk melaksanakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan, sedangkan sekolah kader partai bertujuan untuk membentuk kader partai, mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin partai, bangsa, dan negara.

Sejalan dengan yang termuat dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama Fx. Hadi Rudyatmo yang menyebutkan bahwa :

“PDI Perjuangan melakukan kaderisasi itu ada sekolah partai namanya, itu dimulai dari kader pratama, madya, kader utama. Sehingga dengan melalui sekolah kader ini lah kader-kader PDI Perjuangan mampu menyerap ilmu yang diberikan oleh para senior-senior partai dalam memahami tentang ideologi dasar negara, ideologi bangsa, dan ideologi partai. ... yang menjadi bekal bagi kader PDI Perjuangan untuk melaksanakan dan menjalankan roda organisasi dan melaksanakan dan menjalankan apabila kader-kader PDI Perjuangan ini menduduki di jabatan legislatif dan eksekutif.” (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

Secara konstitusi dan nilai ideal partai, kaderisasi partai dilakukan salah satunya untuk mempersiapkan kader PDI Perjuangan menduduki jabatan eksekutif termasuk kepala daerah. Maka untuk menjadi calon kepala daerah dari PDI Perjuangan idealnya harus melakukan kaderisasi berjenjang dan mengikuti sekolah kader partai. Akan tetapi, dalam implementasinya, PDI Perjuangan memiliki regulasi dinamis dalam tiap periode rekrutmen calon kepala daerah dimana kaderisasi tidak selalu dijadikan sebagai persyaratan pencalonan melainkan PDI Perjuangan memiliki pertimbangannya sendiri dalam menentukan calonnya. Adanya perbedaan ini dikarenakan perubahan sistem rekrutmen dari PDI Perjuangan dimana sebelum tahun 2014 menggunakan sistem rekrutmen tertutup dan mulai beralih menggunakan

sistem terbuka pada pemilu 2014 sebagai upaya untuk meningkatkan elektabilitas partai dan sebagai respon terhadap persaingan elektoral yang ketat. Hal yang mendasari argumen ini adalah fakta pencalonan Joko Widodo sebagai kandidat calon presiden dari PDI Perjuangan. Joko Widodo sebenarnya bukan merupakan bagian dari struktural partai sehingga pencalonannya adalah bertujuan pada kemenangan elektoral. Maka sejak daripada saat itu, hingga elektoral yang berikutnya PDI Perjuangan konsisten menggunakan sistem rekrutmen terbuka, termasuk dalam tingkatan pilkada.

3.1.1 Proses Rekrutmen Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020

Proses rekrutmen kepala daerah Kota Surakarta tahun 2020 oleh PDI Perjuangan menggunakan sistem rekrutmen terbuka. Sebagaimana teori rekrutmen politik yang diungkapkan oleh Pippa Norris, PDI Perjuangan memulai proses rekrutmen kandidat Pilkada yang diawali dengan identifikasi atau selektoral dimana PDI Perjuangan melakukan selektoral calon kepala daerah dengan membuka peluang baik untuk kader internal maupun kader eksternal untuk mencalonkan diri. PDI Perjuangan juga membuka pintu pendaftaran di setiap lapisan partai yaitu DPC, DPD, dan DPP. Keputusan PDI Perjuangan dalam kedua hal ini menjadi bukti bahwa PDI Perjuangan menganut sistem rekrutmen terbuka dalam kandidasi kepala daerah.

Pada tingkat DPC, fungsi rekrutmen yang dilimpahkan yaitu identifikasi atau selektoral, yaitu DPC berfungsi untuk menjangkau sebanyak mungkin calon yang potensial. DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta melakukan proses identifikasi dan seleksi yang hidup

maksudnya adalah DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta tidak hanya berdiam diri dengan sebatas menerima pendaftaran administratif dari kandidat yang hendak mencalonkan diri, tetapi DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta melakukan seleksi internal atau penjaringan yang dilakukan secara *bottom up* untuk menetapkan kandidatnya. Proses itu dilaksanakan dengan melakukan penjaringan aspirasi yang dimulai dari struktur kelembagaan partai yang berada di bawah tingkatan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta.

Adapun PDI Perjuangan sendiri memiliki struktur kelembagaan bertingkat, sebagai berikut :

- a) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), merupakan induk atau pusat dari segala kelembagaan partai PDI Perjuangan di Indonesia.
- b) Dewan Pimpinan Daerah (DPD), merupakan struktur kelembagaan partai di tingkat Provinsi.
- c) Dewan Pimpinan Cabang (DPC), merupakan struktur kelembagaan partai di tingkat Kota.
- d) Pimpinan Anak Cabang (PAC), merupakan struktur kelembagaan partai di tingkat Kecamatan.
- e) Ranting, merupakan struktur kelembagaan partai di tingkat kelurahan.
- f) Anak ranting, merupakan struktur kelembagaan partai di tingkat Rukun Warga (RW).

Struktur kelembagaan PDI Perjuangan diatur dalam bentuk hierarki yang jelas dari tingkat pusat hingga daerah. Setiap tingkatan

memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi tetap berada dalam garis koordinasi dan komando yang terpusat. Artinya setiap kelembagaan ini bersifat desentralisasi fungsional, masing-masing memiliki fungsi tersendiri yang diberikan oleh pusat atau dalam maksud tidak diberikan hak otonomi karena segala tindakan harus dipertanggungjawabkan secara struktural. Struktur kelembagaan PDI Perjuangan sendiri dirancang untuk menjaga hubungan erat dengan basis massa, yaitu rakyat kecil dan kaum marhaen. Hal ini tercermin dalam pendekatan struktur partai yang menyentuh hingga tingkat anak ranting yang berfungsi untuk memastikan bahwa partai tetap relevan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa PDI Perjuangan masih mengupayakan untuk menggapai aspirasi dan kebutuhan rakyat, PDI Perjuangan membuat keputusan supaya di tingkat DPC melakukan penjaringan untuk kepala daerah setingkat Kota/Kabupaten dengan sistem *bottom up* yaitu penjaringan yang dilakukan secara struktural dari bawah ke atas dimulai dari anak ranting hingga DPC dengan tujuan yaitu tetap relevan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat, sedangkan DPD selain diberi kewenangan untuk melakukan penjaringan kepala daerah di setingkat Provinsi, DPD juga diberi kewenangan untuk menerima pendaftaran setingkat Kota/Kabupaten. DPD juga berhak melakukan penyaringan lebih lanjut terhadap calon yang diusulkan oleh DPC dengan melakukan verifikasi faktual di lapangan, termasuk melakukan wawancara dan penilaian terhadap

rekam jejak calon untuk memastikan bahwa calon yang diusulkan ke tingkat pusat (DPP) adalah yang terbaik dari segi elektabilitas, pengalaman, dan komitmen kepada partai. Begitu pula DPP yang menerima pendaftaran bagi pencalonan di segala tingkat disamping fungsi utamanya untuk melakukan verifikasi akhir dan kandidasi.

Dengan tugas wewenang penjaringan yang telah diberikan kepada DPC, Maka DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta melaksanakan penjaringan kandidat Kepala Daerah yaitu Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 dengan skema sebagai berikut:

- a) Pengurus dan anggota anak ranting yang berada di tiap-tiap RW mengadakan forum diskusi untuk mengusulkan nama-nama yang ingin diajukan dalam pencalonan wali kota Surakarta. Tidak ada batasan dalam hal ini berapa nama yang hendak diusung, karena di tingkat anak ranting, mereka hanya bertugas untuk melakukan usulan penjaringan. Hasil yang didapatkan kala itu adalah terdapat beberapa nama yang muncul di tiap-tiap anak ranting salah satu yang paling dominan adalah Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa.
- b) Hasil dari forum diskusi penjaringan nama yang telah dilakukan di tingkat anak ranting dibawa ke tingkat ranting (kelurahan). Pada tahap ini, mereka yang berada di tingkat ranting menerima sejumlah nama dan kemudian mereka melakukan inventarisir yaitu pengumpulan, pencatatan, pendokumentasian dan analisis

data karena sangat mungkin bahwa antara anak ranting satu dengan anak ranting lain memiliki hasil penjaringan yang sama.

- c) Di tingkat PAC, terdapat pertemuan antar ranting dengan membawa nama-nama yang telah direkap dan kemudian dilakukan inventarisir.
- d) DPC mengadakan konvensi penjaringan yang dihadiri sebanyak lima PAC sesuai dengan jumlah kecamatan yang berada di Kota Surakarta. Masing-masing perwakilan dari PAC membacakan nama yang terjaring dan kemudian dilakukan penghitungan bahwa suara mayoritas yang muncul adalah Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Langkah selanjutnya setelah nama ini muncul adalah melakukan adu gagasan, dan dalam adu gagasan ini, secara mufakat seluruh anggota konvensi menyetujui pencalonan Achmad Purnomo sebagai kandidat wali kota Surakarta dan Teguh Prakosa sebagai wakilnya.
- e) DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta melakukan pemberkasan terkait pencalonan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa dan kemudian DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta mendaftarkan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa secara administratif kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.

(Skema ini ditulis berdasarkan analisis peneliti yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan bernama YF. Sukasno)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan seluruh narasumber sebagaimana terlampir dalam lampiran penelitian ini,

didapatkan data yang menyebutkan bahwa DPC telah melakukan penjangkaran aspirasi yang dimulai dari anak ranting di tiap-tiap RW di seluruh Kota Surakarta, aspirasi yang dimaksud adalah berupa usulan mengenai nama yang ingin diajukan untuk mewakili PDI Perjuangan dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020. Kemudian aspirasi itu dibawa ke tingkat ranting dan dibawa naik lagi ke tingkat PAC, hingga kemudian dari sejumlah lima PAC PDI Perjuangan di Kota Surakarta memberikan hasil penjangkarnya kepada DPC di dalam konvensi yang diselenggarakan DPC dengan hasil keputusan bahwa DPC mengusung Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta untuk Pilkada Tahun 2020. Hasil penjangkaran ini kemudian didaftarkan secara administratif kepada DPD sesuai dengan mekanisme peraturan partai untuk kemudian ditindaklanjuti dalam proses penyaringan, verifikasi lapangan, uji kelayakan, dan wawancara hingga akhirnya dibawa naik ke tingkat DPP untuk dilakukan verifikasi akhir dan penetapan kandidasi berdasarkan keputusan pemberian rekomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Achmad Purnomo dan Teguh prakosa ini sudah melalui proses penjangkaran dan sudah kita kirim ke DPP bahwa seluruh masyarakat Surakarta khususnya PDI Perjuangan mendukung penuh Achmad Purnomo-Teguh Prakosa menjadi wali kota dan wakil wali kota” (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

Dengan hasil penjangkaran yang sudah didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta ke DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, maka DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta telah selesai

melaksanakan tugasnya dalam hal rekrutmen/seleksi internal kepala daerah. Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam wawancara dengan peneliti kala peneliti menanyakan mengenai mekanisme rekrutmen Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon kepala daerah melalui PDI Perjuangan dalam Pilkada Kota Surakarta di tahun 2020. Fx. Hadi Rudyatmo memberikan pernyataan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta tidak menerima pendaftaran dari calon lain karena proses rekrutmen kepala daerah oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sudah selesai dengan hasil pendaftaran Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa ke DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.

“Saat itu Pak Jokowi minta ke Saya kalau anaknya kepingin jadi walikota, ya silahkan. Karena proses penjangkaran ini sudah selesai kita kirim ke DPD, akhirnya Mas Gibran mendaftarnya ke DPD partai.” (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

Setelah DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta selesai menjalankan fungsinya dalam rekrutmen kepala daerah, proses yang terjadi selanjutnya berada dalam wewenang DPD dan DPP PDI Perjuangan. Sebagaimana kebijakan PDI Perjuangan mengenai jalur pendaftaran pencalonan kepala daerah melalui PDI Perjuangan adalah melalui tiga pintu yang terbuka yaitu melalui DPC, DPD dan DPP. Maka dalam hal rekrutmen calon kepala daerah Kota Surakarta, PDI Perjuangan menerima kandidat kepala daerah lain selain hasil penjangkaran DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta yaitu pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang mendaftarkan dirinya melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.

Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan dirinya dalam Pencalonan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 kepada PDI Perjuangan melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah. Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah tidak memengaruhi keputusan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam hal pencalonan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa, sehingga saat itu PDI Perjuangan memiliki dua kandidat mendaftar sebagai calon wali kota dan satu kandidat mendaftar sebagai wakil wali kota Surakarta. Dengan proses yang terjadi di pusat, pada akhirnya DPP PDI Perjuangan memberikan keputusan rekomendasi calon kepala daerah Kota Surakarta berdasarkan hak prerogatif ketua umum partai; Megawati Soekarno yaitu kepada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Setelah DPP PDI Perjuangan memberikan keputusan rekomendasi pencalonan kepala daerah dalam pilkada Kota Surakarta tahun 2020 kepada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, maka proses yang terjadi selanjutnya adalah kemenangan. Berdasarkan kesepakatan Kongres PDI Perjuangan yang diadakan di Bali pada 8-11 Agustus Tahun 2019, telah diberikan keputusan yang disepakati bersama bahwa Ketua Umum Partai memiliki wewenang penuh bernama hak prerogatif untuk menentukan keputusan rekomendasi pencalonan kandidat baik dalam bidang eksekutif dan legislatif dalam kontestasi pemilihan umum untuk mewakili PDI

Perjuangan. Sifat dari hak prerogatif ini adalah wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh struktural dan anggota PDI Perjuangan.

“Di dalam PD Perjuangan itu ada yang namanya memberikan kewenangan sepenuhnya pada ketua umum di kongres, sehingga ketua umum itu mau membuat rekomendasi pada siapapun tidak ada penolakan” (Wawancara dengan YF. Sukasno, 13 Juni 2024)

Pasca turunnya keputusan DPP PDI Perjuangan untuk memberikan rekomendasi Pencalonan Kepada Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 kepada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, maka DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta bersama organ partai dibawahnya memiliki kewajiban untuk menerima dan melaksanakan keputusan DPP PDI Perjuangan.

Saya sebagai ketua DPC bertanggung jawab, akhirnya seluruh jajaran mulai anak ranting, ranting, PAC, DPC kita kumpulkan semua bahwa inilah pilihan dari ketua umum hukumnya wajib kita memenangkan dan melaksanakan. (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

Proses yang terjadi selanjutnya yaitu kemenangan dan pelaksanaan rekomendasi. Meskipun DPP PDI Perjuangan tidak meloloskan calon yang direkomendasikan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta atas hasil konvensi berjenjang yang telah dilakukan, namun DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta tetap wajib untuk melaksanakan dan memenangkan Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya tidak mengikuti proses rekrutmen yang diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Sikap yang diambil DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta ini adalah komitmen tegak lurus kepada struktural partai.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta, PDI Perjuangan resmi mengikutsertakan dirinya dengan mengusung Gibran

Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat dan kekecewaan mendalam dari internal DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, namun PDI Perjuangan berhasil memenangkan calonnya dengan persentase kemenangan sebesar 86,5% dari total seluruh suara sah. Kemenangan eksekutif ini memperkuat posisi PDI Perjuangan sebagai partai dominan dimana dalam masa jabatan Gibran Rakabuming Raka didukung oleh 75% kursi legislatif atau sekitar 30 kursi dari total 45 kursi DPRD Kota Surakarta adalah PDI Perjuangan.

3.1.2 Transparansi Proses Rekrutmen dan Kandidasi Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020

Proses rekrutmen kepala daerah terkhusus mengenai proses yang terjadi di tingkat DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi seluruh anggota PDI Perjuangan di Kota Surakarta melalui sistem penjaringan *bottom up*. Dalam mekanisme penjaringan yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta ini proses seperti pendengaran pendapat hingga adu gagasan diberi wadah dalam forum konvensi. Maka hasil dari penjaringan itu sendiri yaitu dukungan kepada pencalonan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa begitu kuat. Bahkan dalam pendaftarannya kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPC menyatakan bahwa seluruh masyarakat Surakarta khususnya PDI Perjuangan mendukung penuh Achmad Purnomo – Teguh Prakosa menjadi wali kota dan wakil wali kota.

Namun demikian, Proses rekrutmen yang terjadi di tingkat pusat tidak menunjukkan sisi transparansi baik itu kepada anggota internalnya maupun kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan peraturan partai yang memberikan hak pengambilan keputusan rekomendasi pencalonan kepala daerah adalah dilakukan oleh ketua umum partai. Hal ini berdasarkan atas keputusan kongres PDI Perjuangan V yang dilakukan pada 8-11 Agustus 2019. Dalam momentum itu, berdasarkan keputusan anggota kongres, PDI Perjuangan menyepakati untuk memberikan hak prerogatif kepada ketua umum terkait pembuatan keputusan pencalonan eksekutif dan legislatifnya. Keputusan ini bersifat mutlak dan wajib untuk diikuti oleh seluruh kelembagaan serta anggota PDI Perjuangan.

Pada kasus Pencalonan Kepala Daerah Kota Surakarta dalam kontestasi Pilkada Tahun 2020, keputusan ketua umum terkait kandidasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota dari PDI Perjuangan dilakukan secara pribadi oleh Ketua Umum Partai; Megawati Soekarno Putri. Keputusan ini diberikan kepada DPC tanpa menyertakan alasan karena memang tidak ada kewajiban dari ketua umum untuk memberikan alasan atas keputusannya, serta tidak memiliki ruang diskusi karena memang hukumnya adalah mutlak dan tidak dapat diperdebatkan meskipun keputusan itu menimbulkan gejolak kekecewaan di tingkat DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta.

“Ya semua tidak ada bargaining-bargaining semua kita serahkan ke DPP karena kita sebagai peserta kongres sudah memberikan hak prerogatif kepada ketua umum sehingga apapun keputusan ketua umum bagi Saya hukumnya wajib untuk dilaksanakan

sehingga tidak ada bargaining-bargaining lain.” (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

“Setelah turun rekomendasi itu sudah enggak ada lagi pembahasan, tapi ya dilaksanakan. Enggak ada lagi diskusi yang lain karena dari DPP sudah turunnya nama itu ya sudah semua harus memenangkan nama itu.” (Wawancara dengan YF Sukasno, 13 Juni 2024)

Keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan pribadi dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Tidak ada penjelasan apapun mengenai alasan dari keputusan PDI Perjuangan lebih memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon meskipun bukan dan belum pernah berproses sebagai kader PDI Perjuangan dibandingkan dengan Achmad Purnomo yang merupakan kader PDI Perjuangan sekaligus petahana wakil wali kota selama 2 periode dimana pencalonannya sendiri merupakan usulan dan rekomendasi dari masyarakat Kota Surakarta terkhusus PDI Perjuangan berdasarkan klaim dari ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta.

Sebagai bagian dari konvensi yang merasa telah melakukan penjarangan sesuai dengan peraturan partai, sangat dipahami bahwa kekecewaan yang mendalam telah dirasakan oleh internal DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Bagaimana tidak kecewa bilamana calon yang diinginkan yaitu Achmad Purnomo merupakan kader internal yang telah lama berproses di Kota Surakarta sehingga anggota internal merasa bahwa mereka mengenal dan telah mengetahui bahwa kinerja Achmad Purnomo adalah yang paling pas sebagai wali kota Surakarta.

“Ya kecewa no. Wong Saya sendiri sebagai ketua umum partai pun ya kecewa. Kecewa, namun demikian karena ini keputusan

DPP dan terlebih dari ketua umum ya sudah kita jalankan dan jalankan” (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

Sejatinya kekecewaan ini muncul karena tidak adanya penjelasan yang lebih lanjut dari DPP PDI Perjuangan terkait keputusannya. Sehingga hal ini memunculkan berbagai pendapat yang berasalkan dari kabar angin dan sebagainya bahwa keputusan ini adalah berdasarkan atas campur tangan Joko Widodo selaku presiden definitif Indonesia yang merupakan ayah dari kandidat yang dimenangkan; Gibran Rakabuming Raka.

“Pendapat Saya, dari situ ini adalah pertarungan dari kota dengan pertarungan yang pada saat itu ayahnya Mas Gibran kan masih presiden. Kalau ngomong kan semua warga berkerkesempatan sama, “kalau tidak suka Saya ya jangan pilih Saya dong” kan bahasanya begitu, tapi kan ini berbicara proses tentunya ini sedikit banyak berpengaruh meskipun tidak dapat dibuktikan secara eksplisit.” (Wawancara dengan Wahyu Haryanto, 19 Juni 2024)

Wahyu Haryanto menjelaskan bahwa PDI Perjuangan di tingkat kota saat itu (dalam proses kandidasi kepala daerah) telah berjuang untuk mempertahankan aspirasi kotanya yaitu pencalonan Achmad Purnomo sebagai wali kota. PDI Perjuangan di Kota Surakarta telah menghadapi pertarungan dengan Presiden Joko Widodo yang menghendaki pencalonan anaknya: Gibran Rakabuming Raka. Namun, disayangkan bahwa tidak adanya transparansi proses kandidasi ini telah menimbulkan gejolak kekecewaan yang mendalam hingga ke arah keputusan dari anggota internal partai yang merasa tidak berdaya melawan kekuatan yang dimiliki oligarki partai.

3.2 Pengaruh Oligarki dalam Kandidasi Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020

Praktik oligarki dalam partai politik dilandasi oleh adanya segelintir orang dalam jabatan struktural atau biasa disebut elit partai yang menguasai sumber daya partai termasuk dalam hal pengambilan keputusan partai. Oligarki partai ini berusaha mengamankan kekuasaan dan melebarkan kekuasaannya dengan cara menjadi pemenang pemilu. Hal ini selaras dengan pendapat dari Hee Yeon Cho pakar politik asal Korea Selatan yang menyebutkan bahwa Indonesia sekarang ini berangsur-angsur berubah menjadi oligarki demokratis yakni sejenis oligarki yang ingin mempertahankan kekayaan sekaligus merebut kekuasaan melalui kompetisi elektoral (pemilu) yang berwatak elitis (Koho, 2021). Artinya adalah persaingan antara kelompok oligarki satu dengan kelompok oligarki lainnya semakin kompetitif hingga dalam hal yang paling demokratis seperti pemilu pada dasarnya hanyalah ajang untuk menentukan oligarki mana yang akan menguasai negara demokrasi ini. *“In many democracies, the wealthy play a disproportionately large role in shaping the policies of the state, thus combining oligarchic power with democratic procedures”* (Winters, 2011). Dalam pendapat Winters juga disebutkan bahwa oligarki dan demokrasi dapat saling menunggangi satu sama lain dengan cara saling melengkapi dan saling memanfaatkan.

Untuk menjadi pemenang pemilu, partai politik dapat melakukan apa saja karena dengan menjadi pemenang, maka partai dapat memasukkan orang-orangnya ke dalam kursi pemerintahan yang nantinya akan menjadi tokoh pembuat kebijakan. Melalui kebijakan yang dibuat oleh tokoh-tokoh inilah

partai dapat mengontrol agar kepentingan partai dan kepentingan jaringannya tidak terganggu. Hal ini menjadi kecemasan bagi partai politik yang kalah dalam kompetisi karena nantinya kepentingan partai mereka tidak memiliki jaminan yang lebih besar seperti mereka yang memenangkan pemilu.

Elit partai atau petinggi partai seperti ketua umum partai dan jajarannya dapat membuat jaringan atau koneksi dengan orang yang berkepentingan sama dengan tujuan yang dimiliki oleh elit. Dimana jaringan ini akan saling bahu membahu dan memanfaatkan satu sama lain untuk mengamankan kepentingan mereka. Jaringan ini biasa disebut sebagai patronase. Jaringan patronase umumnya terbentuk akibat adanya hutang budi antara elit partai dengan pendukungnya maupun dengan pihak yang diberi keuntungan oleh elit partai. Pendukung elit disini adalah mereka yang banyak memberikan support terkhusus dalam hal finansial dan pengaruh dalam memenangkan partai di ajang kontestasi pemilu, contohnya adalah konglomerat, *local strongman*, media massa, hingga tokoh yang membantu meningkatkan popularitas partai. Selanjutnya yang dimaksud dengan pihak yang diberi keuntungan merujuk kepada mereka yang mendapat keuntungan dari proyek-proyek pemerintah yang dibuat oleh pejabat partai yang duduk dalam kursi pemerintahan.

PDI Perjuangan sebagai subjek dalam penelitian ini merupakan salah satu partai besar yang mendominasi era reformasi. Sebagai partai yang cukup berkonsentrasi terhadap aspek demokrasi, benarkah bahwa PDI Perjuangan sudah mengedepankan kepentingan demokrasi itu? Sayangnya konsep demokrasi ini tidak serta merta menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang pro terhadap demokrasi secara mutlak. Dalam beberapa aspek, PDI Perjuangan

lebih tepat dikatakan sebagai aktor dari oligarki demokratis. PDI Perjuangan pada dasarnya adalah partai politik yang juga dikuasai oleh oligarki dimana para oligarki ini melakukan usaha yang sedemikian rupa untuk menghindari kekalahan dalam ajang kontestasi pemilu. Mereka pada kenyataannya juga melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Seperti dalam hal struktural yang dikuasai oleh Megawati Soekarnoputri bersama dengan keluarganya, pengambilan keputusan partai yang tersentralisasi pada Megawati Soekarnoputri tanpa dibarengi dengan transparansi termasuk dalam hal kebijakan kandidasi elektoral yang juga diputuskan hanya oleh Megawati Soekarnoputri dengan kriteria pelolosan yang hanya diketahui oleh Megawati Soekarnoputri.

3.2.1 Struktur Kepemimpinan PDI Perjuangan

Struktur kepemimpinan PDI Perjuangan peneliti temukan berkaitan erat dengan oligarki, terutama karena sentralisasi kewenangan adalah bersifat struktural dengan puncaknya adalah berada di tangan ketua umum partai; Megawati Soekarnoputri. Fakta bahwa Megawati Soekarnoputri telah memegang kendali sebagai ketua umum selama bertahun-tahun dimana posisinya sebagai pemimpin partai merupakan warisan politik sebagai putri dari Ir. Soekarno, pendiri Indonesia sekaligus penggagas cikal bakal PDI Perjuangan. Selain itu, di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ini, kala PDI Perjuangan menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak dan mendapat kursi terbanyak di DPR RI, Ia menunjuk anaknya Puan Maharani sebagai

Ketua Umum DPR RI. Hal ini mencerminkan bahwa struktur kepemimpinan PDI Perjuangan adalah terpusat pada satu keluarga.

Terpusatnya struktur kepemimpinan partai pada Megawati Soekarnoputri sering disuarakan sebagai kepemimpinan karismatik. Sosok Megawati Soekarnoputri memiliki pengaruh yang dominan dalam PDI Perjuangan sehingga loyalitas terhadap pemimpin merupakan salah satu elemen penting dalam struktur kelembagaan PDI Perjuangan. Selain itu, PDI Perjuangan juga menerapkan kedisiplinan organisasi yang ketat, dimana anggota dan kader partai memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan partai, keputusan pimpinan, dan menjalankan tugas sesuai dengan garis kebijakan partai, bahkan PDI Perjuangan juga menerapkan pengadaaan sanksi bagi anggota partai yang melanggar aturan atau tidak mengikuti garis partai.

Dalam hal struktur kepemimpinan yang berkaitan dengan kelembagaan, PDI Perjuangan menerapkan sistem kepemimpinan yang sangat terpusat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai organisasi induk memegang kendali penuh atas arah partai. Namun, perlu diketahui bahwa dalam hal kelembagaan, PDI Perjuangan memiliki hierarki yang komplit hingga bahkan menyentuh ke tingkat akar yaitu anak ranting. Akan tetapi, baik itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kabupaten/Kota, hingga Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat Kecamatan, Ranting di tingkat kelurahan dan Anak Ranting di tingkat RW hanya diberi

kewenangan secara fungsional dan keputusan-keputusan strategis tetap berada di tangan DPP dan terutama Megawati Soekarnoputri.

Dikatakan sebagai organisasi desentralisasi fungsional adalah bahwa tiap lembaga bertanggung jawab kepada lembaga di atasnya (*bottom up*) dan bahwa setiap lembaga yang dibentuk di tiap tingkatan ini bertujuan untuk mewakili DPP pada wilayah tingkatannya sehingga mereka tidak memiliki otonomi untuk membuat keputusan, dengan kata lain mereka hanyalah mandat. Mandat sendiri diberikan dengan tujuan agar pihak yang menerima (kelembagaan PDI Perjuangan di bawah DPP) melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan oleh pemberi mandat (DPP) dan sebagai penerima mandat harus bertanggung jawab langsung kepada pemberi mandat dan harus melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Selain dalam hal struktural kepemimpinan yang begitu oligarkis dan sentralistik, terdapat aspek lain dalam penelitian ini yang peneliti lihat sebagai variabel yang tidak dapat dilepaskan dari sifat oligarkis itu sendiri yaitu terkait dengan jaringan patronase. PDI Perjuangan memang memiliki tujuannya sendiri untuk membesarkan namanya dalam hal kekuasaan, namun untuk mencapai kekuasaan dan melebarkan sayap kekuasaan itu, PDI Perjuangan membutuhkan patron. Saat ini, patron utama PDI Perjuangan adalah Megawati Soekarnoputri yang dianggap telah menjadi sosok yang memberikan pengaruh besar bagi eksistensi dan keberhasilan PDI Perjuangan. Maka dari itu, PDI Perjuangan mengemban sifat sebagai klien yang berhutang

budi kepada Megawati Soekarnoputri. Hal ini cukup kuat untuk menjelaskan mengapa PDI Perjuangan begitu mendukung dan bahkan melayani kepentingan Megawati Soekarnoputri.

Hubungan patronase terbesar yang dimiliki oleh PDI Perjuangan adalah relasinya dengan Joko Widodo. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini merupakan figur sentral dunia politik Indonesia. Eksistensi dari Joko Widodo itu sendiri bahkan dapat dikatakan telah melebihi eksistensi dari partai manapun. Terdapat hal unik dari hubungan patronase antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo dimana posisi antara patron dan klien ini berubah secara signifikan pasca terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Joko Widodo pada awalnya berada dalam posisi klien sedangkan PDI Perjuangan adalah patronnya. Hal ini dikarenakan pada awal masa karir Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2005 dan 2010, Joko Widodo menjadi pihak yang lebih membutuhkan dukungan dari PDI Perjuangan dan juga Megawati Soekarnoputri. Dalam proses ini PDI Perjuangan juga bertindak menjadi provider yang memfasilitasi pencalonan Joko Widodo mulai dari kampanye dan juga memberikan pengaruhnya dalam basis massa dimana di Kota Surakarta sendiri tempat Joko Widodo mencalonkan diri merupakan wilayah yang didominasi oleh PDI Perjuangan. Posisi ini tetap bertahan hingga pencalonan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2012 meskipun dalam masa ini Joko Widodo mulai membangun popularitasnya sendiri.

Pada proses pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden pada tahun 2014 dan 2019, hubungan patronase antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan semakin menguat dan mendalam. Akan tetapi, posisi mereka sebagai patron dan klien mulai membias. Hal ini dikarenakan pada proses ini, Joko Widodo sudah mulai memiliki kekuatannya sendiri dalam popularitas dan elektabilitas. Terkhusus dalam periode kedua Joko Widodo menjabat sebagai presiden, popularitas Joko Widodo telah melampaui popularitas PDI Perjuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa saat itu PDI Perjuangan berada dalam posisi yang lebih membutuhkan Joko Widodo agar dapat memenangkan elektoral.

Posisi Joko Widodo sebagai patron dari PDI Perjuangan juga mulai tergambarkan dengan jelas dimana PDI Perjuangan mulai bertindak sebagai pihak yang berhutang budi pada Joko Widodo. Sehingga dikala Joko Widodo mulai membangun dinastinya dengan mencalonkan keluarganya dalam posisi strategis kepala daerah, PDI Perjuangan mengambil perannya untuk melayani keinginan itu dan membantu menyukseskan pencalonan keluarga Joko Widodo. Contohnya adalah pada pencalonan menantu Joko Widodo yaitu Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan di tahun 2020 dengan menyingkirkan atau menggeser pencalonan Akhyar Nasution yang telah lama mengabdikan sebagai kader internal PDI Perjuangan dan merupakan petahana Wakil Wali Kota Medan dan Plt Wali Kota Medan. Yang kedua adalah pencalonan putra kandung Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta pada

tahun 2020 yang juga menggeser pencalonan kader internal PDI Perjuangan; Achmad Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surakarta selama dua periode dan pencalonannya telah mendapat rekomendasi dari seluruh masyarakat Kota Surakarta terkhusus PDI Perjuangan. (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

Dengan adanya fakta bahwa PDI Perjuangan memberikan dukungan dan layanan terhadap kepentingan Joko Widodo yang merupakan bagian dari oligarki PDI Perjuangan berdasarkan hubungan patronase, maka dapat disimpulkan bahwa PDI Perjuangan bersifat oligarkis dimana Ia membuat keputusan berdasarkan atas kepentingan segelintir orang, bahkan dengan mengabaikan keadilan bagi kader internalnya yang sebenarnya sudah loyal kepada PDI Perjuangan. Klaim bahwa PDI Perjuangan bersifat oligarkis juga turut didukung oleh fakta kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang begitu sentralistik.

3.2.2 Proses Pengambilan Keputusan Kandidasi Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam menentukan kandidasi kepala daerah sejatinya dilakukan dengan struktur yang begitu apik. Hal ini dikarenakan oleh keterbukaan PDI Perjuangan terkhusus dalam hal selektoral di tingkat daerah. DPC dan PDP sebagai organ partai difungsikan untuk menjaring calon potensial yang berasal dari daerahnya. Terkhusus di tingkat DPC

Kota/Kabupaten, proses penjaringan ini dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi seluruh organ dibawahnya mulai dari anak ranting, ranting, dan juga PAC. Selain itu, PDI Perjuangan juga sangat terbuka dalam hal kriteria pencalonan. Mengingat bahwa setelah Pemilu Tahun 2014, PDI Perjuangan lebih terbuka dalam hal rekrutmen kandidat eksternal. Sayangnya, struktur pencalonan yang apik ini menjadi ternoda saat mekanismenya telah sampai di pusat yaitu pada proses kandidasi.

Penetapan kandidasi kepala daerah di dalam PDI Perjuangan telah dituliskan di dalam peraturan partai untuk dilakukan secara terpusat atau tersentralisasi. PDI Perjuangan telah mempercayakan wewenang dan hak bernama hak prerogatif terkait dengan penetapan kandidasi kepala daerah baik di tingkat Kota/Kabupaten maupun Provinsi kepada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Berbicara mengenai persoalan kepercayaan PDI Perjuangan kepada Megawati Soekarnoputri itu sendiri sejatinya telah terbentuk sejak lama, dibuktikan sejak pada tahun 1999, pada momentum Kongres Pra-eleksi Partai yang secara rutin dilaksanakan lima tahun sekali yakni dalam tahun sebelum diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, seluruh anggota partai yang terwakilkan dalam Kongres telah menunjukkan konsistensi dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri untuk menjabat sebagai pemimpin partai.

Kepercayaan yang diberikan oleh anggota PDI Perjuangan ini didasari oleh beberapa faktor, yang peneliti asumsikan seperti berikut :

- a) Faktor pertama yang melatarbelakangi kepercayaan anggota PDI Perjuangan kepada Megawati Soekarnoputri untuk melakukan kandidasi yaitu keseganan dan kekaguman terhadap sosok Megawati Soekarnoputri yang dianggap memancarkan kepemimpinan karismatik dan juga terkait rasa hutang budi yang memposisikan Megawati Soekarnoputri sebagai patron dari PDI Perjuangan yang telah berjasa mempertahankan eksistensi partai.
- b) Faktor kedua yaitu loyalitas. PDI Perjuangan telah berproses sangat lama dimulai dari PNI, PDI, hingga akhirnya menjadi PDI Perjuangan. Sehingga pada dasarnya PDI Perjuangan didirikan oleh Ir. Soekarno yaitu presiden pertama sekaligus tokoh pahlawan nasional yang sangat dihormati oleh seluruh anggota PDI Perjuangan. Loyalitas kepada Megawati Soekarnoputri tidak dapat terlepas dari latarbelakangnya sebagai putri Ir. Soekarno.
- c) Faktor ketiga yaitu kepatuhan atau komitmen. Keputusan untuk bersifat terkonsentrasi pada ketua umum terkait dengan kandidasi telah ditetapkan dalam peraturan partai. Maka sebagai ketua umum terpilih, PDI Perjuangan tidak lagi meragukan ataupun mempertanyakan mengenai keputusan yang dibuat Megawati Soekarnoputri karena mereka hanya menjalankan tugasnya untuk mengikuti intruksi partai dan bahkan mereka merasa tidak memiliki kapasitas untuk menilai atau meragukan keputusan itu.

“Kami enggak pada kapasitas untuk menilai keputusan DPP. Sebagai kader partai kami tidak diajarkan untuk menilai keputusan DPP, tapi keputusan DPP itu harus dilaksanakan. Jadi ya sudah meskipun menggerutu tetap harus dilaksanakan” (Wawancara dengan YF. Sukasno, 13 Juni 2024)

“Apapun tujuan DPP harus kita amankan karena ini jadi keputusan kongres di Bali saat itu bahwa ketua umum itu punya hak prerogatif untuk menentukan atau mengambil keputusan-keputusan politik” (Wawancara dengan Suharsono, 13 Juni 2024)

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh kader internal DPC PDI Perjuangan yaitu YF. Sukasno dan Suharsono, dapat dilihat bahwa kepercayaan dan kepatuhan terhadap keputusan Megawati Soekarnoputri ini memang sangat kuat. Dalam hal berpartai, sikap dari dua kader ini adalah ideal bahwa mereka berpartai dengan mengedepankan kepentingan partai. Akan tetapi, benarkah bahwa keputusan kandidasi itu dibuat demi kepentingan partai dan bukan kepentingan oligarki partai semata?

Dalam penetapan kandidasi kepala daerah oleh PDI Perjuangan di Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana merupakan topik utama dan studi kasus dalam penelitian ini, Peneliti menyoroti bahwa PDI Perjuangan memiliki struktur dan skema penjangkaran yang begitu baik dan elok di tingkat kota yaitu yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. DPC melakukan proses penjangkaran bersifat *bottom up*, menyertakan partisipasi dari seluruh organ partai di bawah naungan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Akan tetapi, proses yang terjadi di tingkat DPP justru menunjukkan hal yang berbeda, yaitu bahwa keputusan yang dibuat oleh DPP adalah bersifat sentralistik dan tertutup

yaitu dibuat secara pribadi oleh Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai berdasarkan hak prerogatif.

Proses kandidasi yang bersifat tertutup merupakan celah dari adanya implikasi ketidakadilan terhadap kandidat yang mendaftar. Hal ini didasari oleh adanya privilege pada sebagian kandidat seperti misalnya terkait dengan latarbelakang yang dimiliki kandidat, kekayaan, dan potensi dukungan basis massa yang dimiliki kandidat. Seperti halnya ketika PDI Perjuangan memiliki dua kandidat mendaftar sebagai Wali Kota Surakarta yaitu pencalonan Achmad Purnomo yang memiliki latar belakang pengalaman sebagai kader internal partai selama puluhan tahun dan juga pengalaman politik menjabat sebagai petahana wakil wali kota Surakarta; dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang memiliki latar belakang dinasti tanpa disertai dengan pengalaman politik apapun. Dari dua kandidat ini, Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Joko Widodo yang merupakan jaringan patron partai.

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti menyatakan bahwa PDI Perjuangan telah mengambil keputusan terkait kandidasi berdasarkan atas kepentingan elit partai semata. Pernyataan peneliti ini berdasarkan atas analisis yang telah peneliti lakukan terhadap sumber-sumber kredibel yaitu hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dengan informan yang telah peneliti tetapkan.

Pendapat pertama yang menguatkan pernyataan peneliti berasal dari hasil wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo yang mengatakan bahwa faktor latar belakang dari Gibran Rakabuming Raka sebagai anak dari presiden Joko Widodo memengaruhi keputusan ketua umum partai dalam menentukan rekomendasi pencalonan. “Sebagai anak presiden ya salah satunya itu”. Pendapat serupa juga muncul dari YF. Sukasno yaitu “Ya kalau itu pasti ada hubungannya dengan jabatan Bapaknya”. Pendapat ketiga yang menguatkan berasal dari Suharsono yang menyebutkan bahwa:

“Saat itu informasi yang sampai kepada Saya dari Ketua DPC itu: Kita harus mulai melirik istilahnya atau mulai memunculkan kader-kader muda daripada nanti diambil oleh partai lainnya. Karena saat itu kan Gibran adalah anaknya Jokowi, Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan. Sehingga akhirnya Pak Ketua DPC gabisa apa apa karena komitmennya tunduk kepada ketua umum.” (Wawancara dengan Suharsono, 13 Juni 2024)

Latar belakang kandidat Gibran Rakabuming Raka sebagai anak Presiden Joko Widodo yang juga merupakan tokoh elit PDI Perjuangan banyak disebutkan sebagai faktor penyebab ketua umum partai menjatuhkan rekomendasinya kepada Gibran Rakabuming Raka meskipun harus menggagalkan pencalonan Achmad Purnomo yang sudah dipilih melalui proses panjang yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta.

Joko Widodo sendiri merupakan tokoh penting dalam PDI Perjuangan yang pada tahun 2020 telah dianggap menjadi patron dari PDI Perjuangan karena jasanya yang telah menjadi wajah kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Umum selama dua periode dan

dianggap telah meningkatkan popularitas dari PDI Perjuangan. Joko Widodo sendiri sudah sangat mentereng sebagai wajah partai sehingga dirinya dianggap sebagai tokoh sentral PDI Perjuangan meskipun dalam kenyataannya, sosok Megawati Soekarnoputri tetaplah sebagai pusat kepemimpinan dari PDI Perjuangan.

Akan tetapi, sejarah panjang yang dimiliki PDI Perjuangan dengan Joko Widodo telah membangun hubungan patronase yang saling menguntungkan. Dimulai sejak Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 lalu, dimana dalam pemilihan ini, Joko Widodo berhasil memenangkan PDI Perjuangan hingga 2 periode. Selanjutnya, Joko Widodo kembali bersama dengan PDI Perjuangan dalam memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2012, kemudian pada 2014 dan 2019, Joko Widodo berhasil memenangkan jabatan Presiden Republik Indonesia melalui kebersamaan dengan PDI Perjuangan.

Sebagai patron dari PDI Perjuangan, maka Joko Widodo telah masuk ke dalam lingkaran oligarki partai, sehingga kepentingan Joko Widodo terkait pencalonan anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan kepala daerah Kota Surakarta Tahun 2020 mendapat dukungan dari Megawati Soekarnoputri sendiri. Faktor keterlibatan Joko Widodo dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini saja sudah sangat kuat untuk membuat pernyataan bahwa Megawati Soekarnoputri telah mengedepankan kepentingan elit partainya, meskipun di luar hal itu, terdapat pertimbangan kekayaan dan usia

dimana Gibran Rakabuming Raka lebih unggul secara finansial dan lebih unggul secara usia yang dianggap akan mampu mendapatkan suara dari generasi muda.

3.3 Politik Dinasti dalam Pencalonan Wali Kota Surakarta Tahun 2020

Gibran Rakabuming Raka merupakan Wali Kota Surakarta terpilih untuk periode 2020-2024. Gibran Rakabuming Raka maju dalam bursa pencalonan melalui PDI Perjuangan. Dinamika pencalonan diri Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada ini dimulai dengan pendaftaran dirinya melalui DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta yang disampaikan secara pribadi oleh ayahnya; Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta; Fx. Hadi Rudyatmo dan mendapat penolakan dengan alasan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta telah selesai melakukan penjaringan dalam proses rekrutmen kepada daerah. Sehingga kala itu, Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan dirinya dalam pencalonan melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.

Gibran Rakabuming Raka merupakan putra pertama dari Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka memulai karirnya sebagai pebisnis, dimana kala itu beberapa bisnisnya sudah cukup dikenal di Kota Surakarta seperti Chilli Pari; perusahaan catering makanan yang dirintis sejak 2010 hingga kini berkembang ke ranah wedding organizer, Markobar; bisnis kuliner martabak delapan rasa yang dari 2015 hingga 2024 kini sudah memiliki ssekitar 29 cabang di Indonesia, dan Goola; perusahaan rintisan yang didirikan tahun 2018 yang menjual minnumal tradisional jamu. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Surakarta di tahun 2020 merupakan karir politik pertamanya

sebelum di tahun 2024 kemudian mencalonkan diri menjadi wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 dan berhasil memenangkan pencalonan tersebut bersama dengan partai Golkar.

Sebagai politisi yang memulai karir tanpa pernah terlibat di dalam keanggotaan partai politik, Gibran Rakabuming Raka berhasil masuk langsung ke dalam bursa elektoral bersama dengan partai besar di Indonesia yaitu PDI Perjuangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 serta mampu menjadi kandidat Golkar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024. Keberhasilan ini merupakan keistimewaan yang didapatkan dari pengaruh keluarga Gibran Rakabuming Raka yang telah lebih dulu berkiprah di dunia politik sebelum dirinya, dimana ayahnya merupakan Presiden Indonesia pada masa pencalonannya baik saat pencalonan Wali Kota Surakarta maupun Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian kakak iparnya yang menjabat sebagai Wali Kota Medan bersamaan dengan dirinya pada tahun 2020, dan juga saudara kandungnya yang menjabat sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan turut mendukung Gibran Rakabuming Raka pada pencalonan wakil presiden pada tahun 2024.

3.3.1 Keterlibatan Joko Widodo dalam Pencalonan Wali Kota Surakarta Tahun 2020

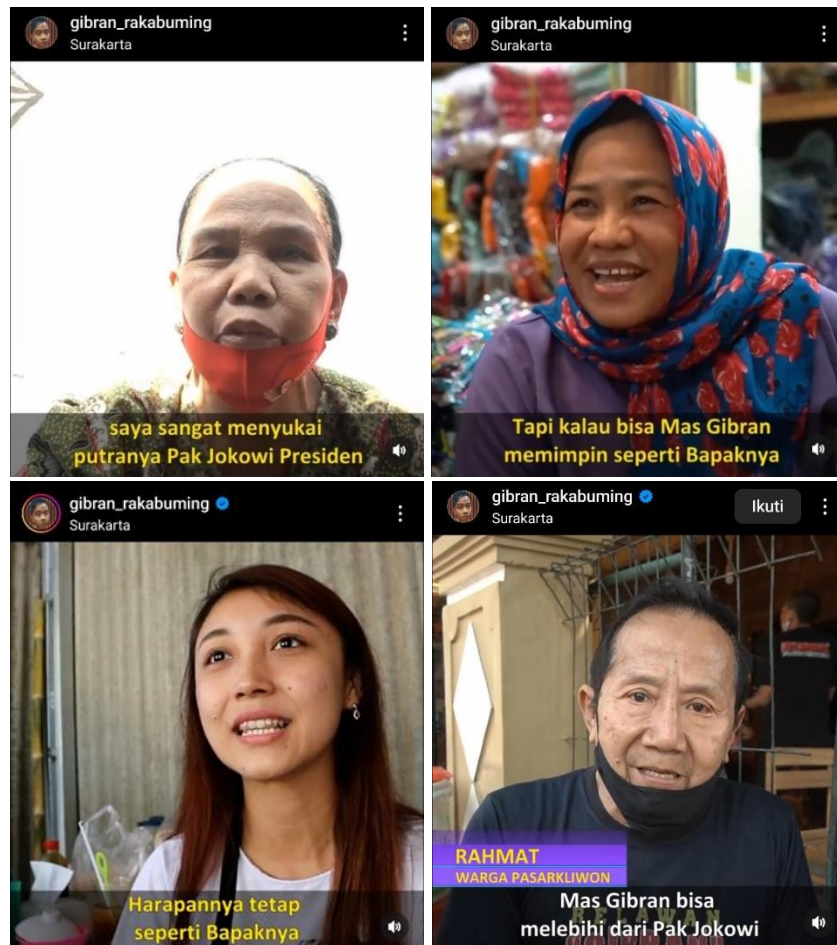
Joko Widodo merupakan tokoh politisi yang sudah lama dikenal di Kota Surakarta jauh sebelum tahun dimana Gibran Rakabuming Raka mencalonkan dirinya sebagai wali kota Surakarta. Bahkan di tahun 2020, Joko Widodo telah menjadi tokoh politisi sentral tanah air yang bukan hanya eksis di Kota Surakarta tapi eksis di seluruh Indonesia. Sebagai

putra daerah, Joko Widodo telah memberikan kepuasan yang tinggi dalam masa kepemimpinannya sebagai wali kota Surakarta di tahun 2005 hingga 2012 serta dianggap memberikan kebanggaan bagi Kota Surakarta untuk memiliki seorang presiden yang berasal dari Kota Surakarta, maka rasa keterikatan masyarakat Kota Surakarta kepada Joko Widodo beserta keluarganya pun terjadi erat.

Kepopuleran Joko Widodo merupakan pintu bagi kepopuleran Gibran Rakabuming Raka. Melalui kepopuleran ini pula citra Gibran Rakabuming Raka sebagai pengusaha muda di kenal oleh masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa latar belakang Gibran Rakabuming Raka turut menjadi alasan kampanye secara tidak langsung kepada masyarakat Kota Surakarta meskipun Joko Widodo sendiri tidak turut serta secara langsung dalam tiap kampanye yang diadakan oleh Gibran Rakabuming Raka maupun melalui PDI Perjuangan. Kepercayaan masyarakat kepada Joko Widodo inilah yang juga menghantarkan kepercayaan masyarakat kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta periode 2020-2024.

Berdasarkan beberapa video bertajuk ucapan selamat dari warga Surakarta pasca terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Surakarta yang diunggah di platform media sosial instagram milik Gibran Rakabuming Raka yaitu, memperlihatkan beberapa pesan yang menunjukkan bahwa masyarakat sulit memisahkan keterikatan antara Gibran Rakabuming Raka dan Joko Widodo meskipun itu dalam hal kepemimpinan dan sebatas harapan.

Gambar 3.1. Dokumentasi Wawancara Masyarakat Berpendapat soal
Gibran Rakabuming Raka



Sumber: Dokumentasi instagram Gibran Rakabuming Raka

”Orangnya baik, ganteng, putranya Bapak Jokowi Presiden. Sangat menyukai walikotanya baru og. Mas gibran menjadi wali kota, semangat! Semangat Mas Gibran. Saya sangat menyukai putranya Pak Jokowi Presiden. Mas Gibran I Love You.”

(Dokumentasi wawancara dengan Porinah dalam https://www.instagram.com/gibran_rakabuming. Diakses pada 15 Agustus 2024)

“Ya ganteng Alhamdulillah. Orangnya baik seperti Bapaknya tidak pengen harta, Ia betul-betul untuk membantu masyarakat. Tapi kalau bisa Mas Gibran memimpin seperti bapaknya Insyaallah. Kalau masyarakat pasti suka Gibran. Tidak ada ini itu intinya Insyaallah Gibran itu orangnya memang betul memimpin, membenahi masyarakat tidak cari harta. Insyaallah nanti mas Gibran mimpin Solo seperti Bapaknya yang dulu. Semoga lancar Mas Gibran.”

(Dokumentasi wawancara dengan Endang dalam https://www.instagram.com/gibran_rakabuming. Diakses pada 15 Agustus 2024)

“Baik dengan masyarakat. Pandangan masyarakat baik. Suka berbagi, harapannya ya tetap seperti bapaknya selalu ingat rakyat kecil.” (Dokumentasi wawancara dengan Aviana dalam https://www.instagram.com/gibran_rakabuming. Diakses pada 15 Agustus 2024)

Harapannya, Mas Gibran bisa melebihi dari Pak Jokowi sehingga membawa Kota Solo lebih bagus. Mas Gibran itu sukses dalam mengelola pekerjaannya (Dokumentasi wawancara dengan Rahmat dalam https://www.instagram.com/gibran_rakabuming. Diakses pada 15 Agustus 2024)

Pendapat dari masyarakat mengenai Gibran Rakabuming Raka yang diwakili dengan pendapat dari Ponirah, Endang, Aviana, dan Rahmat menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terkait Gibran Rakabuming Raka masih dalam kacamata dinasti yaitu Putra Joko Widodo. Selain itu, masyarakat juga menaruh harapan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi seperti Joko Widodo dalam hal karakter dan kepemimpinan. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat secara sadar menerima keberadaan politik dinasti itu di Surakarta.

Dari sisi Gibran Rakabuming Raka sendiri juga terlihat tidak menolak keuntungan yang di dapat dari kepopuleran keluarganya dan justru secara sadar memanfaatkannya, karena dengan sadar dan percaya diri, Gibran Rakabuming Raka menaruh potongan-potongan video itu di laman akun media sosial pribadi miliknya. Maka dapat diartikan pula bahwa Gibran Rakabuming Raka menikmati kepopuleran dan keberhasilannya yang didapatkan dari kepopuleran keluarganya. Apapun alasan yang Gibran Rakabuming Raka pernah katakan kepada publik bila dirinya tidak ingin seperti bapaknya atau memanfaatkan kepopuleran bapaknya telah banyak terbukti tidak valid.

Terkhusus dalam hal mekanisme pencalonan diri Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020, dirinya tidak menolak atau mencegah atas campur tangan yang dilakukan ayahnya terkait pendaftaran dirinya melalui PDI Perjuangan. Gibran Rakabuming Raka justru menunjukkan sikap memanfaatkan koneksi yang dimiliki oleh keluarganya. Dalam hal keterlibatan Joko Widodo dalam candidacy Gibran Rakabuming Raka, terdapat dua bentuk yang peneliti temukan yaitu pemanfaatan suara atau loyalitas konstituen yang diperoleh melalui garis keluarga dan juga pemanfaatan koneksi atau jejaring yang dimiliki oleh keluarganya.

3.3.2 Pengaruh Joko Widodo dalam Pencalonan Wali Kota Surakarta Tahun 2020

Dalam meraih kemenangan elektoral sebagai Wali Kota Surakarta tahun 2020, Gibran Rakabuming Raka harus berkompetisi sebanyak dua kali. Yang pertama adalah kompetisi dalam candidacy PDI Perjuangan. dalam kompetisi ini, Gibran Rakabuming Raka bersaing dengan Achmad Purnomo. Keunggulan yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka dalam candidacy ini adalah yang utama terkait pengaruh keluarganya dimana ayahnya merupakan elit partai yang termasuk dalam oligarki berdasarkan atas hubungan patronase yang dijalin dengan PDI Perjuangan, selain itu, Gibran Rakabuming Raka juga lebih unggul dalam hal keamanan finansial. Lalu terkait dengan keunggulan yang dimiliki oleh lawannya yaitu Achmad Purnomo yaitu pengalaman, elektabilitas, akseptabilitas, popularitas. (Lembaga Survei Median, 2019)

Kompetisi kedua yang dihadapi Gibran Rakabuming Raka adalah pada saat Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020. Dalam kompetisi ini, Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi menjadi kandidat PDI Perjuangan harus melawan Bagyo Wahyono. Keunggulan yang dimiliki Gibran Rakabuming Raka kali ini bisa dikatakan lebih mutlak karena yang pertama dari segi dukungan, Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan dari PDI Perjuangan sebagai pengusungnya dan dukungan dari partai koalisi dari PDI Perjuangan yaitu Partai Gerindra, PAN, PSI, PKB, dan Golkar. (SoloPos.com, 2020). Sedangkan untuk Bagyo Wahyono merupakan calon independen yang tidak berlatar belakang politik pula. Sehingga dari segi popularitas dan dukungan, bahkan finansial, Gibran Rakabuming Raka lebih unggul.

Secara umum, Gibran Rakabuming Raka memiliki nilai atau value sebagai individu yang salah satunya adalah usia. Di tengah ketertarikan generasi muda yang mulai menurun, sosok Gibran Rakabuming Raka sedikit banyak memang diharapkan untuk muncul. Akan tetapi, usia muda tanpa pengalaman juga bukan hal yang baik. Apalagi apabila dalam proses pencalonannya menjegal calon lain secara tidak adil. Mengapa dikatakan tidak adil? Hal ini dikarenakan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka, terdapat proses yang melibatkan campur tangan oligarki dan diiringi oleh praktik politik dinasti.

Pertama, sebelum Gibran Rakabuming Raka ingin mencalonkan diri menjadi wali kota Surakarta melalui PDI Perjuangan, Partai itu telah memulai mekanismenya dengan melakukan penjaringan yang dilakukan

secara *bottom up*. Akan tetapi, Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya tidak tergabung dalam politik, hanya menginginkan pencalonannya melalui PDI Perjuangan. Di Kota Surakarta sendiri, memiliki lebih dari satu partai politik yang eksis meskipun PDI Perjuangan merupakan partai dominan dan memiliki suara terbesar 75% terhitung berdasarkan perolehan kursi legislatif DPRD Kota Surakarta. Dengan fakta ini, dapat dipahami dengan logis bahwa Gibran Rakabuming Raka menganggap bahwa kekuatan dan potensi dirinya sebagai individu tidak mampu menyaingi PDI Perjuangan.

Dalam perspektif lain, PDI Perjuangan sebagai partai dominan di Kota Surakarta berada dalam posisi unggul untuk maju dalam Pilkada. Dengan mengusung Achmad Purnomo maupun Gibran Rakabuming Raka, PDI Perjuangan dinilai masih akan mampu memenangkan Pilkada dengan suaranya yang sebesar 75% itu. Pernyataan peneliti ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Fx. Hadi Rudyatmo yang mengatakan bahwa Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa merupakan yang terbaik dan memberikan argumen bahwa mereka sanggup untuk memberi kemenangan untuk PDI Perjuangan.

“Lha ketika kita melakukan proses penjaringan ya Kita ngotot bahwa Purnomo-Teguh itulah yang baik dan Beliau sanggup untuk memenangkan meraih 35 kursi” (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

Setelah upaya yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam menjaring, dan memperjuangkan perekomendasian Achmad Purnomo, keputusan dari Megawati Soekarnoputri adalah bulat bahwa PDI Perjuangan akan mengusung Gibran Rakabuming Raka. Keputusan

ini dibuat dengan tertutup, tidak disertai keterbukaan terkait kriteria yang dipertimbangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Aspek popularitas, akseptabilitas, popularitas, loyalitas, komitmen dan pengalaman yang dimiliki oleh Achmad Purnomo serta dukungan internal dan menyeluruh dari DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta seakan terabaikan seolah-olah PDI Perjuangan hanya mendengarkan aspirasi elitnya saja, dimana yang dimaksud disini adalah Joko Widodo.

Berikut adalah daftar jawaban informan yang mengatakan bahwa faktor keterpilihan Gibran Rakabuming Raka adalah berasal dari pengaruh Joko Widodo:

“Saat itu Pak Jokowi minta ke Saya kalau anaknya kepingin jadi wali kota ya silahkan. Karena proses penjaringan ini sudah selesai kita kirim ke DPP akhirnya Mas Gibran mendaftarnya ke DPD partai. Begitulah prosesnya sehingga dengan mendaftar kesana otomatis wali kota nya diganti Mas Gibran, wakilnya tetap Teguh Prakosa” (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

“Sebagai anak presiden ya salah satunya itu. Kan dulu kan belum tau kalau ada peristiwa seperti ini karena komitmennya membesarkan PDI Perjuangan kok. Nah sehingga diberi rekomendasi.” (Wawancara dengan Fx. Hadi Rudyatmo, 8 Juli 2024)

“Meskipun itu muda kalau prosesnya melalui proses nepotisme berarti dia bergantung pada orangtuanya atau hirarkinya. Jadi kaya patronnya, siapa yang jadi patronnya” (Wawancara dengan Suharsono, 13 Juni 2024)

“Saya bilang, filosofi Jawa itu kan ada yang namanya anak polah bapak keprada. Kalau anaknya ada sesuatu pasti bapaknya tidak tinggal diam, pasti dia cawe-cawe. Nah ini satu kepastian, nggak mungkin tidak” (Wawancara dengan Suharsono, 13 Juni 2024)

“Ya kalau itu pasti ada hubungannya dengan jabatan Bapaknya. Coba njenengan dewe moro ke DPD Provinsi “Pak Kula ndaftar” kemudian ditanya dari mana dan menjawab dari DPC Solo, ya mungkin disuruh daftar ke DPC. Mungkin gitu, tapi karna anak orang yang punya jabatan ya diterima, lalu dibawa ke DPP dan diintruksikan ke kita ya kita sudah tidak ada diskusi lagi. Yasudah harus dimenangkan. Karena budaya di PDI Perjuangan seperti itu” (Wawancara dengan YF Sukasno, 13 Juni 2024)

“Saya nggak tau apa pertimbangan DPP, tapi seorang anak presiden mau daftar di partai manapun pasti diterima. Jadi kalau ditanya apakah itu ada kaitannya dengan jabatannya bapaknya, kok naif banget kalau ada yang mengatakan: “ngga ada, itu kapasitas”, Kapasitas apa? Kaderisasi aja belum pernah ikut. “itu kapabilitas”, kapabilitas apa? Ya kaya sekarang diajukan jadi wakil presiden, pertimbangannya apa? Ngga ada” (Wawancara dengan YF Sukasno, 13 Juni 2024)

“Ini adalah pertarungan dari kota dengan pertarungan yang pada saat itu ayahnya Mas Gibran kan masih presiden. Kalau ngomong kan semua warga berkesempatan sama, “kalau tidak suka Saya ya jangan pilih Saya dong” kan bahasanya begitu, tapi kan ini berbicara proses tentunya ini sedikit banyak berpengaruh meskipun tidak dapat dibuktikan secara eksplisit” (Wawancara dengan Wahyu Hartanto, 19 Juni 2024)

Pengaruh Joko Widodo sebagai presiden dan juga patron PDI Perjuangan telah membawa keberhasilan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta. Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai diberikan kepercayaan oleh segenap anggota PDI Perjuangan untuk mendapatkan hak prerogatif memutuskan perihal kandidasi kepala daerah, dan dengan hak itu, Megawati Soekarnoputri mengambil keputusan untuk memberikan dukungan kepada dinasti Joko Widodo. Tidak dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan patronase antara Megawati Soekarnoputri dengan Gibran Rakabuming Raka terkait proses ini, karena pada dasarnya mereka tidak berhubungan secara langsung sebagai dua pihak patron dan klien. Akan tetapi hubungan ini lebih tepat untuk disebut sebagai bentuk klientelisme. Joko Widodo sebagai patron dari PDI Perjuangan telah berhasil mengambil hutang budi PDI Perjuangan dengan cara meminta dukungan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka.